

BAB I PENDAHULUAN

1. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Komisi I DPR RI yang membawahi bidang tugas Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, serta Komunikasi dan Informatika melakukan Kunjungan Kerja ke Republik Perancis dan Republik Italia pada tanggal 14-20 April 2011.

2. DASAR KUNJUNGAN DAN SUSUNAN DELEGASI

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Republik Perancis dan Republik Italia dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Pimpinan DPR RI nomor: 89/PIMP/III/2010-2011 dan didukung oleh Anggaran DPR RI melalui DIPA DPR RI T.A. 2011 MA. 002.02.001030.08.1025.01.001.014.524211.

Adapun susunan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Republik Perancis dan Republik Italia, sebagai berikut:

NO	NAMA	FRAKSI	KET
1.	Tubagus Hasanuddin	PDI Perjuangan	Ketua Delegasi
2.	Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, S.IP., MM.	Partai Demokrat	Anggota Delegasi
3.	KRMT. Roy Suryo Notodiprojo	Partai Demokrat	Anggota Delegasi
4.	Mirwan Amir	Partai Demokrat	Anggota Delegasi
5.	Ramadhan Pohan, MIS	Partai Demokrat	Anggota Delegasi
6.	Edhie Baskoro Yudhoyono, B.COM., M.Si.	Partai Demokrat	Anggota Delegasi
7.	Jeffrey Geovanie	PG	Anggota Delegasi
8.	Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom.	PG	Anggota Delegasi
9.	Ir. Neil Iskandar Daulay	PG	Anggota Delegasi

NO	NAMA	FRAKSI	KET
10.	Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	PG	Anggota Delegasi
11.	Theodorus J. Koekerits	PDI Perjuangan	Anggota Delegasi
12.	Drs. H. Sumaryoto	PDIP Perjuangan	Anggota Delegasi
13.	M. Syahfan Badri Sampurno	PKS	Anggota Delegasi
14.	Muhammad Nadjib	PAN	Anggota Delegasi
15.	Suprihartini, S.IP.	Sekretariat Komisi I DPR RI	
16.	Suparno	Sekretariat Komisi I DPR RI	

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Perwakilan RI, termasuk mengetahui sejauhmana ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah serta pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri telah dilaksanakan.
2. Dalam bidang pertahanan, Komisi I DPR RI tengah berupaya untuk mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi I DPR RI juga perlu mengadakan intensifikasi dan diversifikasi kerja sama militer RI dengan berbagai Negara-negara sahabat.

4. JADWAL KUNJUNGAN

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	ACARA
1.	Kamis/14 April 2011	15.00-17.00	Pertemuan dengan DGA (<i>Delegation Generale pour l'Armement</i> = Direktorat Persenjataan Kemhan Perancis)
		17.00-19.00	Pertemuan dengan DCNS (<i>Direction des Constructions Navales Systemes & Services</i> = Direktorat Galangan Kapal Sista dan Jasa)
		20.00-22.30	Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Duta Besar RI untuk Republik Perancis merangkap

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	ACARA
			Kepangeranan Andora
2.	Jumat, 15 April 2011	08.30-10.30	Pertemuan dengan DCI (<i>Defense Conseil International</i> = Konsultan Pertahanan Internasional)
		10.45-12.00	Pertemuan dengan Perusahaan EADS (<i>European Aeronautic Defence and Space Company</i> = Perusahaan Aeronautika Pertahanan dan Luar Angkasa Eropa)
		12.15-13.30	Pertemuan dengan Perusahaan CNIM (<i>Constructions Industrielles de la Mediterranee</i> = Konstruksi Industri Mediterania)
		15.30-18.00	Pertemuan dengan <i>Thales Raytheon Systems</i>
3.	Sabtu, 16 April 2011	10.30-13.30	Pertemuan dengan WNI di Paris
4.	Minggu, 17 April 2011	17.30	Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Duta Besar RI untuk Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Cyprus, FAO, IFAD, WFP, dan UNIDROIT
5.	Senin, 18 April 2011	09.00-13.30	Pertemuan dengan Pejabat Industri Strategis Pertahanan Italia (EOS S.p.A., Oto Melara, Alenia SI, Alenia Communications, Iveco-Oto, MBDA)
		15.00-17.00	Pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Italia (Wakil Menteri Pertahanan Italia, Kepala Kerja Sama Internasional Asia Afrika, Oceania, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Timur Jauh)
6.	Selasa, 19 April 2011	10.00-11.30	Pertemuan dengan Ketua Komisi Pertahanan Parlemen Italia

BAB II GAMBARAN TENTANG NEGARA KUNJUNGAN

1. REPUBLIK PERANCIS

A. UMUM

Nama Negara	: Republik Perancis (Republique Francaise)
Ibu Kota	: Paris
Area	: 547,030 sq km (daratan: 545,630 sq km; air: 1,400 sq km) tidak termasuk teritori luar/overseas territory
Agama Mayoritas	: Kristen (Protestan, Katolik Roma, Katolik)
Jumlah Penduduk	: 64.667.000 juta jiwa (Januari 2010)
Jumlah WNI	: 3188 (per Oktober 2010)
Bahasa	: Perancis
Kepala Negara	: Presiden Nicolas Sarkozy (UMP)
Perdana Menteri	: M. François Fillon (UMP)
Menteri Luar Negeri	: M. Bernard Kouchner (Independen, sebelumnya PS)
Sistem Pemerintahan	: Demokrasi Parlementer
Harapan Hidup	: 77 tahun (pria), 84 tahun (wanita)(UN)
Ekspor Utama	: Mesin dan peralatan transportasi, produk agrikultural termasuk anggur (wine)
GNI per Kapita	: US \$38,500 (World Bank, 2007)

B. PERKEMBANGAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PERANCIS

- 1). Hubungan bilaterai RI-Perancis telah terjalin dengan baik sejak September 1950 dan cenderung terus meningkat tanpa masalah-masalah yang mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Peningkatan hubungan baik tersebut ditandai dengan saling kunjung antara pejabat kedua negara, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral.
- 2). Bidang Pertahanan
 - a). Indonesia dan Perancis belum memiliki *Defence Cooperation Agreement*, titik berat Kerma pada pengadaan Alutsista.
 - b). Kerja sama bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan pada tanggal 11 Juli 1996 ditandatangani oleh Menhankam di Paris
 - c). Kerja sama bidang persenjataan ditandatangani oleh Sekjen Dephankam di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1983.
 - d). Penandatanganan pembelian panzer VAB (*Vehicule de l' Avant Blinde*) sebanyak 32 unit pada tahun 2006 oleh Dirjen Ranahan dan wakil dari Renault Truck

Perancis disaksikan oleh Sekjen Dephan. Pengiriman panser dibagi dalam 3 tahap, yaitu: 11 Januari 2007, 17 februari 2007, dan 31 Maret 2007.

- e). Sejak Tahun 1972-2011, sebanyak 272 Pa TNI telah mengenyam pendidikan di berbagai Lemdik di Perancis. Sebaliknya Pa Perancis yang mengikuti pendidikan di Indonesia dari tahun 1975-2010 sebanyak 4 orang.
- f). Indonesia-Perancis telah melaksanakan *bilateral talks* dalam rangka meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara dalam bidang pendidikan pada 19 Januari 2009 di Dephan Jakarta.
- g). Alutsista yang dibeli dari Perancis, diantaranya ranpur, alkomsus, meriam artileri lapangan 105 mm, elemen rudal exocet, rudal anti pesawat terbang, rudal KRI, heli colibri, dan radar thomson.

3). *Pending matters*

- a). Perundingan putaran kedua P4M
- b). Kesepakatan administratif Kementerian ESDM RI dengan Kementerian Ekologi dan *Sustainability* Perancis mengenai Kerja Sama di Bidang Energi dan Sumber Daya
- c). MoU kerja sama di bidang pariwisata
- d). MoU kerja sama di bidang pengembangan kapasitas di bidang metrologi
- e). Perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas RI-Perancis

2. REPUBLIK ITALIA

A. UMUM

Nama Resmi	: Republik Italia (<i>Repubblica Italiana</i>)
Bentuk Pemerintahan	: Republik
Ibukota	: Roma
Kepala Negara	: Presiden Giorgio Napolitano
Kepala Pemerintahan	: PM Silvio Berlusconi (hasil pemilu 13-14 April 2008)
Letak	: Terletak dalam cekung Mediteranian di antara Bujur Utara 47% dan 35 % Bujur Selatan
Perbatasan	: - Utara : Perancis (panjang perbatasan 488 km), Swiss (470 km), Austria (430 km), Slovenia (232 km) - Barat : Laut Tyrhenia - Timur : Laut Adriatik - Selatan : Laut Ionia Vatikan: panjang perbatasan 3,2 Km (terletak didalam kota Roma) San Marino: panjang perbatasan 39 Km terletak di perbatasan wilayah Rogmana dan wilayah Marche
Hari Nasional	: 2 Juni
Luas	: 301.277 Km ² , Pulau Sicilia 25.707

Penduduk	: 60.387.000 juta jiwa (laporan Biro Pusat Statistik Italia (ISTAT)-2009)
Jumlah WNI	: 1322 orang (Maret 2011)
Agama	: Katholik Roma (98%), Protestan, Yahudi, dan Islam
Total GDP (CIA Worldfactbook)	: US\$ 1,782 trilyun (2010)
Tingkat Inflasi	: 1,4% (2010)
Bahasa Resmi	: Italia (bahasa resmi), Jerman (di wilayah Trentino-Alto Adige), Perancis (di wilayah Valle d' Aosta), Slovenia (di wilayah Trieste-Gorizia)
Iklim	: Daerah Alpen = - 300 C, daerah-daerah Campania, Publia dan Calabria = - 150C, daerah-daerah Selatan (Sicilia dan Sardinia) = 450 C.
Suku Bangsa	: Italia (di perbatasan Utara terdapat kelompok minoritas Jerman, Perancis dan Slovenia); sedangkan di Selatan terdapat keturunan Italia-Albania dan Italia-Yunani
Produk Komersil	: Buah dan sayuran, anggur, kentang, gandum, produk susu, ikan, pariwisata, mesin, besi, bahan kimia, tekstil, kendaraan bermotor, sepatu, keramik
Mata Uang	: Euro (EUR)
Mitra Dagang	: Germany, France, Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, Belanda, China, Belgia

B. PERKEMBANGAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-ITALIA

- 1). Hubungan RI - Italia diawali dengan pengakuan Republik Italia terhadap Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949. Hubungan kedua negara selama ini berjalan baik dan secara umum menunjukkan peningkatan. Dalam rangka peningkatan hubungan kerja sama badan legislatif kedua negara, Parlemen Italia telah membentuk Komisi Hubungan Bilateral Parlemen Indonesia-Italia. Untuk meletakkan landasan kerja sama yang lebih kokoh, Indonesia-Italia juga telah melakukan penandatanganan dokumen kerja sama di berbagai bidang, diantaranya, yaitu: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (1990), Persetujuan Kerja Sama Kebudayaan (1997), Persetujuan Kerja Sama Sains dan Teknologi (1997), MoU Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik, dan Industri Pertahanan (1997), MoU Kerja Sama Pertahanan (2007), dan MoU Konsultasi Bilateral (2009).
- 2). Hubungan bilateral ekonomi RI-Italia
 - a). Total nilai perdagangan Italia dengan Indonesia untuk tahun 2010 mencapai US\$ 3,2 milyar.
 - b). Produk andalan Indonesia di pasar Italia adalah batubara dan CPO. Lebih dari sepertiga batu bara impor Italia berasal dari Indonesia. Produk Indonesia lainnya yang juga telah memasuki pasar Italia adalah batubara; tekstil dan produk tekstil;

footwear; minyak sawit; *video recorder*; *furniture and part*; karet alam dan produk karet; timah; kopi; *seats*; kakao; dan produk kertas.

- c). Produk Italia yang banyak diimpor Indonesia adalah *telephone sets*, *machinery for preparing or making up tobacco*, *diswashing machines/machinery for cleaning, part and accessories of the motor vehicles*, *machines and mechanical appliances*, *leather further prepared after tanning*, *taps/cocks/valves and similar appliances*.
 - d). Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total nilai investasi Italia di Indonesia pada tahun 2010 mencapai \$ 23.400.000.
- 3). Hubungan bilateral hankam RI-Italia
- a). Hubungan bilateral hankam RI-Italia belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Sampai saat ini baru pada tahap penempatan Athan masing-masing di kedua negara dan kerja sama dalam bidang pendidikan.
 - b). Dalam bidang pendidikan, kerja sama telah terjalin dengan baik. Sejak tahun 1970-Juni 2011, pihak RI telah mengirimkan 47 orang siswa ke Italia, sedangkan siswa Italia yang sekolah di Indonesia sejak tahun 1970-2010 berjumlah 5 orang
- 4). *Pending Matters*
- a). Tawaran Program Kerja Sama dari *Altiero Spinelli Center* kepada *Institute for Peace and Democracy*
 - b). Tawaran Program Kerjasama di bidang Industri Militer Angkatan Laut & Angkatan Udara
 - c). Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
 - d). MoU Kerja Sama di bidang Logistik dan Industri Pertahanan

BAB III HASIL KUNJUNGAN

Dalam kunjungan ke Republik Perancis dan Republik Italia pada tanggal 14-20 April 2011, Delegasi Komisi I DPR RI telah mengadakan pertemuan dengan:

1. Republik Perancis

- a. Duta Besar RI untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andora
- b. WNI di Paris
- c. DGA (*Delegation Generale pour l' Armement*), yaitu lembaga di bawah Kementerian Pertahanan Perancis yang bertugas dan bertanggungjawab dalam:
 - 1). Pengembangan dan implementasi program penelitian, desain, dan produksi senjata
 - 2). Pengawasan perusahaan nasional dan pengaturan keterlibatan perusahaan swasta dalam program persenjataan
 - 3). Mendukung usaha ekspor senjata dan mengawasi peraturan ekspor senjata.DGA menangani 80 program persenjataan sesuai dengan modernisasi AP Perancis. DGA fokus pada aspek produksi maupun aspek penelitian dan pengembangan (*research and development*), guna memaksimalkan produktivitas industri militer dan pertahanan Perancis, yang berkontribusi besar terhadap keuangan negara. DGA hadir di 20 negara, termasuk NATO dan Uni Eropa.
- d. DCNS (*Direction des Constructions Navales System dan Services*)
Sebelumnya bernama *Direction des Constructions Navales* (DCN), yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang persenjataan laut. Perusahaan ini mendesain dan membuat kapal perang, sistem tempur, infrastruktur pelabuhan, dan pemeliharaan kondisi operasi pasukan. DCNS telah melakukan *merger* dengan divisi Naval Thales dan kelompok galangan kapal Eropa, namun saham terbesar dikuasai Pemerintah Perancis. DCNS bertindak sebagai produsen utama atau co-produsen untuk sejumlah program AL Perancis seperti kapal selam, peluncur roket generasi baru Triumphant, kapal induk *Charles de Gaulle*, fregat horizon, fregat serba guna FREMM, kapal selam nuklir Barracuda, kapal selam Scorpene dan kapal perang Mistral. Produk DCNS dijual ke AL, Perancis, dan negara-negara lain dengan ijin dari Pemerintah Perancis.
- e. DCI (*Defense Conseil Internasional*) merupakan perusahaan swasta yang peran utamanya melakukan alih pengetahuan tentang pertahanan dan keamanan Perancis kepada negara-negara sahabat. 49,9% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Perancis. DCI mempekerjakan 700 karyawan, 250 orang diantaranya bekerja di luar negeri. DCI memiliki kantor cabang di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Malasia. Pada awalnya, kegiatan utama DCI adalah membantu ekspor persenjataan Perancis kepada negara-negara lain, yaitu memberi jaminan alih pengetahuan tentang persenjataan yang dijual. Dalam perkembangannya, DCI mengembangkan dua bidang keahlian, yaitu pelatihan dan konsultasi dan asistensi bidang pertahanan dan keamanan nasional seta asistensi manajemen proyek. DCI berbeda dengan industri pertahanan senjata, karena ia tidak menjual senjata, namun DCI adalah perusahaan penyedia jasa. DCI berupaya menjadi

mitra penting Kemhan Perancis sebagaimana digariskan dalam Buku Putih Hankam Perancis 2008 (*livre blanc*). DCI memiliki hubungan yang erat dengan Direktorat Persenjataan Kemhan Perancis (DGA). Selain itu, 4 cabang operasional yang dimiliki CDI merefleksikan struktur Kemhan Perancis, yaitu: COFRAS menangani konsultasi untuk matra darat dan gendarmerie, NAVCO untuk matra laut, AIRCO untuk matra udara, dan DESCO untuk program persenjataan.

- f. EADS (*European Aeronautic Defence and Space Company*), didirikan pada tanggal 10 Juli 2000 dan merupakan peleburan dari perusahaan Aerospatiale Matra (Perancis), Daimler-Chrysler Aerospace AG (Jerman), dan CASA (Spanyol). EADS memiliki 5 sektor kegiatan, yaitu Airbus, pesawat angkut militer, aeronautika, ruang angkasa, dan sistem sipil dan militer. Di tingkat internasional, EADS termasuk salah satu perusahaan papan atas, khususnya dalam bidang peluncuran roket internasional, pembuatan helikopter, pesawat transpor sipil, rudal dan sistem rudal, pesawat angkut militer.
- g. CNIM (*Constructions Industrielles de la Mediterranee*) merupakan grup perusahaan industri Perancis yang bergerak dalam 3 sektor utama, yaitu lingkungan, mekanika, dan energi. Grup ini terkenal sebagai spesialisasi dalam menghasilkan gagasan dan merealisasikan gagasan tersebut di negara kerja sama. CNIM terdapat di 21 negara dan bekerjasama dengan 3300 lembaga. Di bidang teknik pertahanan dan militer, CNIM unggul dalam desain dan produksi jembatan militer dalam berbagai jenis, termasuk jembatan apung, bantalan kering, tempur, logistik, dan rakit. Selain itu, CNIM juga menghasilkan konsep baru kapal pendarat (*landing craft*) untuk jenis LCU, LCT, dan LST, serta konsep baru kapal patroli serba guna.
- h. *Thales Raytheon Systems*, sebelumnya bernama Thomson CSF, merupakan grup perusahaan di bidang aerospace, pertahanan, dan teknologi informasi, yang tersebar di 50 negara dengan jumlah pekerja 68.000 orang. Thales termasuk perusahaan terkemuka khususnya dalam sistem informasi pertahanan dan keamanan serta transportasi. Pemasukan perusahaan ini Tahun 2010 tercatat sebesar 13,1 milyar euro. Hingga Mei 2010, *shareholding structure* Thales: 27% dimiliki Perancis, 26% dimiliki Dassault Aviation, 47% dalam berbagai kepemilikan, dan 3% dimiliki karyawan. Thales terbagi dalam 7 divisi:
 - 1). *Avionique*
 - 2). *Defense Terrestre*
 - 3). *Espace*
 - 4). *Operations Aeriennes* (salah satunya perusahaan Thales Raytheon Systems)
 - 5). *Systemes C4 1 de Defense et Securite*
 - 6). *Systemes de Mission de Defense*
 - 7). *Systemes de Transport*

Beberapa program utama dan produk utama Thales, yaitu pesawat tempur Rafale dan Mirage, pesawat angkut A 400 M, dan helikopter (Tiger dan NH90), radar surveillance darat kapal Sawai II (Arab Saudi) kapal SIGINT (Perancis) dan kapal pemburu "Huon" (Australia).

2. Republik Italia

- a. Duta Besar RI untuk Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Cyprus, FAO, IFAD, WFP, dan UNIDROIT, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Duta Besar RI

- b. Kementerian Pertahanan Italia (Wakil Menteri Pertahanan Italia, Kepala Kerja Sama Internasional dan Industri, dan Kepala Kerja Sama Internasional Asia Afrika, Oceania, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Timur Jauh)
- c. Ketua Komisi Pertahanan Parlemen Italia
- d. Pejabat Industri Strategis Pertahanan Italia, antara lain EOS S.p.A, Oto Melara, Alenia SI, Alenia Communications, Iveco-Oto, MBDA)

Dari hasil pertemuan-pertemuan di atas, Delegasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Duta Besar RI untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andora

Dalam pertemuan dengan Duta Besar RI di Paris, diperoleh informasi bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan RI di Paris telah berjalan dengan baik. KBRI Paris terdukung oleh 20 (dua puluh) orang *home staff* dan 38 (tiga puluh delapan) orang *local staff*, termasuk staf pribadi Dubes dan pengemudi KBRI. KBRI Paris saat ini memiliki 7 (tujuh) buah aset tidak bergerak, yang terdiri dari 2 (dua) gedung kantor, Wisma duta, dan wisma DCM, serta 3 (tiga) apartemen untuk staf. Harga seluruh aset milik KBRI Paris bernilai €32.823.480. Secara umum, dukungan fasilitas yang dimiliki KBRI Paris sudah baik, namun terdapat beberapa kendala permasalahan dan tantangan yang dihadapi KBRI Paris dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

 - a. Dalam konteks perlindungan WNI, KBRI tidak memiliki fasilitas penampungan untuk WNI bermasalah/terlantar dan mahasiswa Indonesia yang memerlukan penampungan sementara/transit.
 - b. Dalam rangka pelayanan tamu/delegasi, KBRI menghadapi kendala terbatasnya jumlah kendaraan dan pengemudi. Dalam satu tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan 6 (enam) kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, tetapi baru akan mendapat penggantian dari pusat pada tahun 2012.
 - c. Keterbatasan lahan parkir KBRI maupun yang disediakan oleh Pemerintah Perancis untuk kendaraan dinas maupun staf.
 - d. Tidak adanya media cetak lokal yang berbahasa Inggris.

2. Pertemuan dengan WNI di Paris

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Delegasi menjelaskan mengenai maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Negara Perancis dan Italia. Dijelaskan bahwa saat ini Komisi I DPR RI sedang menggodok RUU tentang Industri Strategis Pertahanan Nasional dalam upaya mendukung dan mendorong visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional dan mengadakan intensifikasi dan diversifikasi kerja sama militer RI dengan berbagai Negara-negara sahabat. Disamping itu, Komisi I DPR RI juga saat ini sedang melakukan pembahasan RUU tentang Intelijen Negara dalam upaya melahirkan payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan intelijen di Indonesia. Disisi lain, Delegasi juga menjelaskan mengenai rencana pembangunan gedung DPR RI yang saat ini menjadi isu yang berkembang di masyarakat. Rencana pembangunan gedung DPR RI tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun karena banyaknya masukan dari berbagai pihak, rencana pembangunan gedung baru ini sedang dikaji ulang.

Dalam sesi tanya jawab, muncul pertanyaan seputar RUU Intelijen, terkait dengan peran intelijen dalam menanggulangi aksi terorisme, mulai dari bom surat hingga yang terjadi di

Cirebon dan kasus tertangkapnya Umar Patek di Pakistan, serta kontrol terhadap ceramah guna mencegah timbulnya aliran ekstrim, namun tidak bertentangan dengan hak atas ruang kebebasan publik. Dijelaskan bahwa RUU Intelijen jika dikaitkan dengan UU Anti Terorisme ditujukan untuk memperkuat kinerja intelijen dalam membatasi ruang gerak terorisme dan juga mengatur ruang gerak intelijen sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di alam demokrasi Indonesia. Penanganan terorisme tidak dapat lagi dilakukan secara koersif tetapi persuasif, sehingga memerlukan waktu dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan kalangan ulama. Di samping itu, RUU Intelijen ditujukan untuk memperkuat kelembagaan dan koordinasi badan intelijen yang mengatur hubungan antar badan intelijen militer dan kepolisian, tetapi juga dengan sipil.

Terkait rencana pembangunan gedung baru MPR-DPR RI, pertanyaan lebih ditekankan pada ide penambahan Staf Ahli dari 2 (dua) orang menjadi 4-5 orang yang dirasakan berlebihan. Penambahan Staf Ahli mengindikasikan DPR di satu pihak akan membangun argumen dan referensi dalam menyusun program-program, sehingga menjadi lebih mandiri dan di pihak lain sistem pemilihan di Indonesia masih belum mengarah pada program. Di samping itu, pembangunan gedung diharapkan tidak menutup akses konstituen terhadap Anggota Dewan. Dijelaskan bahwa rencana pembangunan gedung saat ini masih diendapkan dan sedang dipikirkan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan. Gedung dinilai sudah tidak layak, tidak hanya untuk ruang kerja, tetapi juga sarana penting, seperti tempat ibadah dan toilet. Sementara penambahan Staf Ahli diperlukan sejalan dengan tugas yang diemban, karena Komisi memiliki 14 Mitra dan saat ini hanya memiliki 2 Staf Ahli dan dinilai tidak memadai, termasuk dalam membantu tugas pembuatan undang-undang. Rencana pembangunan gedung juga dimaksudkan untuk menerima konstituen dengan layak, meskipun demikian akses dan komunikasi juga dapat dilakukan melalui sarana komunikasi dan jaringan sosial yang populer, seperti BBM, *Twitter*, dan *Facebook*.

Menanggapi pertanyaan mengenai perlunya Pemri untuk lebih memperhatikan potensi beberapa negara di Afrika, seperti Angola, yang dikatakan memiliki cadangan minyak dan gas sebanyak dua kali daripada Indonesia, tetapi tidak memiliki fasilitas pengolahan LNG seperti di Bontang, Komisi mengatakan menyambut baik info yang diberikan dan akan menyampaikan dalam kesempatan pertemuan berikutnya dengan Kemlu. Selain itu, Komisi I DPR RI menyambut baik upaya untuk mengirimkan Tenaga Ahli dari Angola untuk belajar di Indonesia dan pengiriman Tenaga Ahli Indonesia untuk melatih Tenaga Ahli di Angola.

Berkaitan dengan pertanyaan mengenai upaya pembebasan sandera awak kapal WNI yang tengah berada di Somalia, Komisi I DPR RI menyampaikan terdapatnya beberapa opsi untuk mengupayakan pembebasan, mengingat pendekatan terhadap Pemerintah Somalia dan pendekatan pada pihak ketiga yang memiliki akses terhadap perompak tidak membuahkan hasil. Pertama, dengan membayar uang tebusan namun dapat menimbulkan preseden, dan kedua dengan melakukan pengiriman pasukan komando. Namun kedua opsi ini masih dipertimbangkan, salah satunya karena perlu adanya penanganan dengan baik, sehingga para sandera dapat pulang dengan selamat ke Indonesia.

3. Pertemuan dengan Kalangan Industri Strategis Pertahanan Perancis

Dalam pertemuan dengan Kalangan Industri Strategis Pertahanan Perancis, Delegasi telah mendapatkan masukan mengenai program Industri Strategis Pertahanan Perancis, baik untuk

matra darat, matra laut, maupun matra udara. Perancis saat ini tengah meningkatkan program pertahanan, melalui peningkatan program persenjataan, pesawat militer, maupun sarana dan infrastruktur pertahanan. Beberapa kerja sama Industri Strategis Pertahanan Perancis dengan Indonesia yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI menekankan pada peningkatan program pendidikan dan latihan serta *transfer of technology*. Dalam kunjungan ke Perusahaan Thales, Delegasi juga bertemu dengan perwira-perwira TNI AU yang sedang melakukan pendidikan dan latihan dalam pengoperasionalan Radar, khususnya Radar yang ditempatkan pada wilayah perbatasan RI. Delegasi juga menjelaskan, bahwa akan dilakukan peninjauan kerja sama antara Industri Strategis Pertahanan Perancis dengan Industri Strategis Pertahanan Indonesia.

4. Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Cyprus, FAO, IFAD, WFP, dan UNIDROIT

Dalam pertemuan dengan Dubes RI, dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan tugas KBRI Roma telah berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini jumlah aset RI yang ada di Roma meliputi Gedung KBRI dan Wisma Duta dengan anggaran pemeliharaan terduduk dalam Anggaran KBRI Roma. Saat ini jumlah WNI di Italia menurut catatan KBRI Roma per Maret 2011 adalah 1322 orang. Permasalahan WNI di Italia pada umumnya dilatarbelakangi karena ijin tinggal yang melebihi batas dan berselisih dengan majikan. Selain itu, terdapat ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Italia/Malta yang mengalami masalah berupa sakit, ditipu, telatnya pembayaran gaji, atau musibah lainnya. Sedangkan WNI di Cyprus umumnya bermasalah dengan statusnya yang ilegal.

5. Pertemuan dengan Pejabat Industri Strategis Pertahanan Italia

Dalam pertemuan dengan Pejabat Industri Strategis Pertahanan Italia, Delegasi telah mendapatkan masukan mengenai program industri pertahanan, baik untuk matra darat, matra laut, maupun matra udara. Italia saat ini tengah meningkatkan program pertahanan, melalui peningkatan program persenjataan, pesawat militer, maupun sarana dan infrastruktur pertahanan. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI juga menekankan pada kerja sama dalam program pendidikan dan latihan, serta *transfer of technology*. Delegasi juga menjelaskan, bahwa akan dilakukan peninjauan kerja sama antara Industri Strategis Pertahanan Italia dengan Industri Strategis Pertahanan Indonesia.

6. Pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Italia

Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Pertahanan Italia terkait dengan pengadaan peralatan pertahanan Italia. Dalam proses pengadaan peralatan pertahanan, dijelaskan bahwa industri pertahanan Italia tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan. Industri Pertahanan harus mendapatkan ijin untuk menjual produk pertahanannya, untuk menghindari *tri-angle*, dan agar dapat dikontrol penggunaan industrinya. Pemerintah Italia memberikan dukungan bagi pengembangan produk industri pertahanannya dan Pemerintah tidak ada keharusan membeli produk dari industri pertahanannya. Pengadaan peralatan pertahanan dilakukan secara langsung dan melalui tender terbuka, kecuali jika kebutuhan mereka untuk kepentingan *security* yang tidak dapat

diumumkan. Dalam proses pengadaan, tidak ada pihak ketiga atau dapat dilakukan melalui proses *Government to Government*.

7. Pertemuan dengan Komisi Pertahanan Parlemen Italia

Dalam pertemuan dengan Komisi Pertahanan Parlemen Italia, dijelaskan bahwa Indonesia dan Italia telah memiliki payung kerja sama dalam bidang militer, yaitu Persetujuan RI – Italia mengenai kerja sama pertahanan yang ditandatangani di Roma pada bulan Oktober 2007. Indonesia dan Italia juga telah memiliki Persetujuan Kerja Sama Pengembangan Corvette yang ditandatangani di Roma pada bulan April 2007 oleh Menhan RI dengan Menhan Italia. Namun demikian, kedua Negara belum dapat merealisasikan persetujuan kerja sama tersebut. Pada tahun 2004 Kemhan Italia dan Kemhan Indonesia telah menandatangani *MoU between the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Department of Defense and Security of the Republic of Indonesia concerning Cooperation in the Field of Defense Equipment, Logistics, and Industry*. Pihak Italia telah melakukan proses ratifikasi, namun Indonesia belum melakukan ratifikasi. Pihak Parlemen Italia meminta agar Indonesia dapat segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Delegasi akan menindaklanjuti kepada Pemerintah RI dan Parlemen untuk segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Republik Perancis dan Republik Italia diharapkan dapat ditingkatkan hubungan dan kerja sama antara kedua Negara di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Luar Negeri Delegasi Komisi I DPR RI ke Republik Perancis dan Republik Italia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsinya sekaligus meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara yang saling menguntungkan dan tentunya juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebelum mengakhiri laporan ini, maka segenap Delegasi Komisi I DPR RI ke Republik Perancis dan Republik Italia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran Delegasi, terutama kepada Dubes RI beserta staf KBRI di Paris dan Roma, termasuk instansi-instansi yang telah membantu Delegasi.

Jakarta, 10 Mei 2011
KETUA DELEGASI

TUBAGUS HASANUDDIN
A- 350